

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
TERHADAP BELANJA DAERAH DI KABUPATEN PURWOREJO****Caecilia Rosma W, S.E.,M.Si, Ak***Akuntansi Politeknik Sawunggali Aji**Jl. Wismoaji no. 38 Kutoarjo, Purworejo**Email : caecilia\_ak@polsa.ac.id****Abstract***

*The implementation of the regional autonomy policy is supported by the financial balance between the central government and regional governments as stated in Law No. 33 of 2004 concerning Financial Balance between Central and Regional Governments. In the Act, what is meant by the balance between the central and regional governments is the existence of a government financing system, which includes the financial division between the central and regional governments and regional distribution in a proportional, democratic, fair and transparent manner by taking into account the potential, conditions and needs of each area.*

*Equalization of inter-regional financial capabilities is intended to reduce capacity inequality between regions through the application of formulas that take into account regional needs and potential through the General Allocation Fund (DAU). In the implementation of regional autonomy Regional Original Revenue (PAD) is also needed to provide flexibility to the regions in seeking funding as a manifestation of the principle of decentralization, as well as for the welfare of the people in the region, given the source of regional income received also has limitations.*

*In carrying out efforts to increase the implementation of regional autonomy and the success of the decentralization system, it is necessary to analyze the General Allocation Fund (DAU) and Regional Original Revenue (PAD) on Regional Expenditures. This study aims to analyze the dominant income factors for regional spending, especially in Purworejo Regency for the period 2010 to 2017.*

*The results obtained are stated by the coefficient of determination value 0.966, which means that the general allocation fund and the original revenue area have a positive and significant effect on the regional expenditure with the contribution value of 96.6%. Partially, the general allocation fund has no effect on the regional expenditure and the original revenue of the region has an effect on the regional expenditure with a significance value of 0.006. Simultaneously, general allocation fund and local own revenue have positive and significant influence to local expenditure in Purworejo Regency with significance value 0.000.*

***Keywords:*** *general allocation fund, local revenue, regional expenditure*

## 1. Pendahuluan

Dalam menciptakan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif. Untuk mengembangkan potensi daerah yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 23 Tahun 2014).

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah didukung pula oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat – Daerah. Sesuai dengan amanat UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, dimana pemerintah pusat wajib menjaga perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka Pemerintah Pusat memberikan transfer kepada pemerintah daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai pembangunan pemerintah daerah, disamping itu Pemerintah Daerah diharapkan mampu mencari sumber dana sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membantu pembiayaan pada Belanja Daerah.

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own source revenue*) terhadap belanja daerah sudah banyak dilakukan. Pada penelitian Andri Devita dkk (2014) menunjukkan bahwa PAD selama periode 2007-2012 berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung kabupaten/kota di Provinsi Jambi, meskipun kontribusi PAD masih dibawah 10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa PAD merupakan salah sumber

pembelanjaan daerah dan menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja modal juga akan mengalami suatu peningkatan. (Andri Devita dkk : 2014)

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan daerah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk menggali potensi-potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat mengalokasikan sumber daya ke belanja daerah sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Tiga sumber tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, dengan masa anggaran satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Faktor keuangan merupakan salah satu faktor yang penting dalam setiap kegiatan pemerintah. Karena semakin besar jumlah uang yang tersedia, semakin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Maka, dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah berpengaruh terhadap belanja modal, karena semakin besar kebutuhan daerah untuk kegiatan pembangunan, maka akan semakin besar pula alokasi belanja daerah yang bersumber dari pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, maka akan semakin besar pula alokasi belanja daerah yang akan dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Pendapatan daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan maksimalisasi kemakmuran rakyat. Sumber pendapatan daerah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerahnya dan pendapatan daerah yang bersumber bukan dari pendapatan asli daerahnya.

Salah satu dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). DAU diarahkan untuk mengatasi ketimpangan fiskal yang terjadi di daerah. DAU merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan luar daerah atau daa hibah murni, dimana kewenangan penggunaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah diantaranya dana perimbangan dan pemerintah pusat.

Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Menurut Warsito Kawedar dkk. (2008:48) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kedua jenis pendapatan tersebut merupakan pendapatan daerah yang digunakan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mengerti dan dapat memenuhi aspirasi masyarakat, selain itu pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memanfaatkan pendapatan daerah yang diterima sehingga dapat membiayai pengeluarannya untuk pelaksanaan belanja daerahnya.

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (PSAP No. 2, Paragraf 7). Untuk meningkatkan pengalokasian belanja daerah, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap belanja daerah, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam membelanjakan kebutuhannya secara efektif dan efisien demi kelangsungan hidupnya serta untuk mensejahterakan masyarakatnya di daerah, mengingat sumber pendapatan daerah yang diterima juga memiliki keterbatasan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah
2. Apakah ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah
3. Apakah ada pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersamaan terhadap Belanja Daerah.

### Metode Penelitian

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif kausal, menurut Sugiyono (2010: 37) penelitian kausal adalah suatu penelitian yang mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain yang mempunyai hubungan sebab akibat. Penelitian kausal dalam penelitian ini bertujuan menganalisis dan mencari pengaruh dari variabel bebas yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap variabel terikatnya yaitu Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purworejo selama periode penelitian yaitu Tahun 2010-2017.

### Hipotesis Penelitian

a. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah dapat menggunakan Dana Alokasi Umum untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui Belanja Daerah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pipit Budiarti (2013) bahwa DAU memberikan pengaruh positif terhadap struktur belanja daerah. Elce Yuliana, Paulus Kindagen, Een N

Walewangko (2015) juga memiliki hasil penelitian yang serupa, bahwa DAU merupakan dana transfer tidak bersyarat yang bersumber dari pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap peningkatan belanja daerah.

Dengan adanya kedua bukti tersebut, maka penulis menarik hipotesis pertama sebagai berikut:

H1 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Purworejo.

b. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari potensi sumber daya yang ada di daerah. Sumber-sumber PAD meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak dan retribusi daerah mempunyai proporsi terbesar dalam komponen PAD, sehingga muncul anggapan bahwa PAD identik dengan pajak dan retribusi daerah.

Salah satu hasil penelitian Fransisca yuliana, Kurniawati (2010) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja daerah.

Dengan adanya bukti tersebut, maka penulis menarik hipotesis kedua sebagai berikut:

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Purworejo.

## 2. Pembahasan

Dari hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test diperoleh nilai Asym. Sig. Sebesar 0,979. Karena nilai 0,979 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Hasil dari uji multikolinieritas adalah sebagai berikut :

	Tolerance	VIF
DAU	0,159	6,282
PAD	0,159	6,282

Sumber: Output SPSS 20.0, data sekunder diolah 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari model tidak mengalami gejala multikolinieritas karena memiliki tolerance yang lebih besar dari 0,01 dan VIF yang lebih kecil dari 10.

Pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan uji glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	55173191283,931	166420180020,376		-,332	,754
DAU	,153	,323	,451	,473	,656
PAD	,049	,576	,081	,085	,936

Sumber: Output SPSS 20.0, data sekunder diolah 2018

Dari hasil uji glejser diatas diperoleh nilai signifikansi untuk semua variabel > 0,05. Oleh karena nilai signifikansi pada tabel diatas > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut memenuhi asumsi klasik heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah didalam model regresi terdapat korelasi antar variabel-variabel independen itu sendiri atau berkorelasi sendiri. Pendeteksian gejala autokorelasi dilakukan dengan uji Runs Test. Dari hasil uji statistik runs test diatas diperoleh nilai signifikansi 0,703 > 0,05. karena nilai signifikansi diatas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi problem autokorelasi atau memenuhi asumsi klasik autokorelasi.

**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Berdasarkan hasil uji analisis dengan spss, maka diperoleh persamaan model regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo, sebagai berikut:

$$Y = 409517926262,152 + 0.089X1 + 5.587X2 + \epsilon$$

**Uji Simultan (Uji-F) dan Koefisien Determinasi (R2)**

Hasil uji pengaruh simultan menunjukkan nilai signifikansi 0,000 yang berarti angka ini dibawah 0,05 atau 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Dari hasil uji regresi diperoleh nilai koefisien determinasi (R-Squares) adalah 0,966 yang menunjukkan bahwa model kuat, artinya bahwa variabel Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar 96,6% terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Purworejo, sementara 3,4% dari Belanja Daerah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

**Uji Parsial**

- a. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan uji statistik parsial dengan tingkat keyakinan  $\alpha = 5\%$ , diperoleh nilai t-statistik untuk variabel DAU thitung sebesar 0,132 dan nilai t tabel = 2,015 (t hitung < t tabel) dengan nilai signifikansi t hitung = 0,900 dan signifikansi t tabel = 0,05 (Sig. t hitung > Sig. t tabel), maka dapat dikatakan bahwa H1 ditolak, artinya bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hasil dalam penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pipit Budiarti (2013) dan Elce Yuliana Sumangkut, Paulus

Kindagen, Een N Walewangko (2015) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah. DAU dianggap sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan belanjanya. Akan tetapi, DAU yang setiap tahun diberikan kepada pemerintah daerah tidak selalu memberikan pengaruh positif terhadap belanja daerah. Terdapat alasan lain yang dapat mempengaruhi, salah satunya adalah perbedaan periode waktu penelitian. Selain itu, perbedaan kondisi daerah juga bisa mempengaruhi hasil penelitiannya, pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya

#### b. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Hasil uji statistik variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Purworejo diperoleh  $t$  hitung sebesar 4,638 dan nilai  $t$  tabel = 2,015 ( $t$  hitung >  $t$  tabel) dengan nilai signifikansi  $t$  hitung = 0,006 dan signifikansi  $t$  tabel = 0,05 (Sig.  $t$  hitung < Sig.  $t$  tabel), maka dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kurniawati (2010) tentang pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pemerintah daerah, provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia yang menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diperoleh, maka akan semakin besar pula belanja daerah yang disalurkan untuk meningkatkan layanan publik, seperti melakukan aktivitas pemerintah dan melaksanakan semua program pembangunan daerah. Peningkatan pelayanan publik tidak akan berhasil jika daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi, hal ini karena tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu

tujuan penting yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

### 3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Pemerintah Kabupaten Purworejo mengenai Pengaruh dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah tahun anggaran 2010-2017, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji  $t$  diketahui bahwa Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten Purworejo. Hal ini disebabkan bahwa setiap peningkatan anggaran belanja daerah belum tentu dipengaruhi oleh DAU.
2. PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Purworejo . Hal ini terbukti dengan hasil Uji  $t$  untuk Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari nilai signifikan sebesar 0,006 ( $p = 0,006 < 0,05$ ). Hal ini membuktikan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah yang diperoleh, maka akan semakin besar pula belanja daerah yang disalurkan untuk meningkatkan layanan publik
3. DAU dan PAD secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah, dengan nilai signifikansi 0,000 yang berarti angka ini dibawah 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ).

### Saran

1. Mengingat PAD sangat berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, maka peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam perolehan sumber-sumber PAD harus lebih diintensifkan, sehingga Pemerintah Daerah tidak lagi bergantung pada Dana Alokasi Umum

dalam pembiayaan daerahnya melainkan memaksimalkan penerimaan PAD sehingga daerah dapat mandiri dalam pelaksanaan otonomi daerah.

2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya periode waktu/tahun penelitian dan sampel daerah yang digunakan ditambah sehingga menghasilkan informasi yang lebih mendukung. Disamping itu variabel pengeluaran pemerintah daerah (BD) dibuat menjadi beberapa variabel sesuai dengan rincian atau item pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah daerah sehingga nantinya diharapkan kesimpulan yang diperoleh lebih sempurna.

### Daftar Pustaka

- Andri Devita; Arman Delis; Junaidi (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
- Budiarti, Pipit. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Struktur Belanja Daerah.
- Erlina & Sakti, O. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Salemba Empat: Jakarta.
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Undip: Semarang.
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman & Sri Handayani. (2008). Akuntansi Sektor Publik Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah. Undip: Semarang.
- Kurniawati, Fransisca Yuliana. (2010). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, Dan Kabupaten Di Indonesia. Tesis: UNS.
- Sugiyono. (2013). Statistika Untuk Penelitian. Alfabeta: Bandung.
- \_\_\_\_\_. (2012). Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta: Bandung.
- Sumangkut, Elce Yuliana, Paulus Kindangen & Een N Walewangko. (2015). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Belanja Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta..